

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 145 TAHUN 1965

TENTANG

NAMA DAN RUMUSAN-INDUK SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

PANTJASILA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character Building;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden No. 224 tahun 1964 pasal pertama dari Bagian Kedua, dipandang perlu untuk segera memberi nama dan menetapkan rumusan-induk dari Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Pidato P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus 1964;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 224 tahun 1964;
 4. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Memberi nama Sistem Pendidikan Nasional menjadi Sistem Pendidikan Nasional Pantjasila;
- K E D U A** : Rumusan-Induk Sistem Pendidikan Nasional Pantjasila adalah sebagai berikut:

MUKADIMAH

Bahwasanja dalam rangka menyelesaikan Revolusi kita sebagai Bangsa jang merdeka dan berdaulat kita merasa bertanggung-djawab untuk mentjiptakan dan memiliki suatu Konsepsi Pendidikan Nasional jang revolusioner, jelas dan tegas ditunjukkan kepada tertjapainja ketiga Kerangka Tujuan Revolusi kita.

Dalam merealisasikan perasaan tanggung-djawab itu kita dijakinkan oleh Manipol jang berbunyi :

"Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia harus dipahami oleh tiap warganegara Indonesia sedjak ia dibangku sekolah dan apabila sesudah dewasa. Harus diadakan pendidikan setjara luas, disekolah-sekolah maupun diluar sekolah tentang Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia.

Rakyat Indonesia harus bersatu pikiran mengenai revolusinja sendiri, karena hanya djika ada persatuan dalam pikiran, Rakyat Indonesia dapat bersatu dalam kemauan dan dalam tindakan."

Dan selandjutnja dijakinkan oleh Amanat Negara P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi jang berbunjii :

"Mengenai masalah pendidikan, saja sudah meminta DPA memberikan nasihatnja jang sesuai dengan alam pikiran saja. Pantjawardhana memang sistim pendidikan jang telah lestui. Adapun pengchusususan-pengchusususan dalam melaksanakan sistim itu, ada pengchusususan Pantjadarma, ada pengchusususan Islam, ada pengchusususan Katolik, ada pengchusususan Protestan, ada pengchusususan Budha, ada pengchusususan Hindu Bali, ada pengchusususan Pantjatjinta, dan sebagainya, hal ini memang diperkenankan, asal dasarnya dan isi-moralnja Pantjasila-Manipol/Usdek. Tidak pertjuma bahu lambang nasional kita Bhinneka Tunggal Ika!

Aku ingin bahwa dari-ke-bhineka-tunggal-ikaan itu lahir ide-ide, konsepsi-konsepsi, kreasi-kreasi jang hebat sehebat-hebatnja, dan lahir pula putera-putera, patriot-patriot, sardjana-sardjana, seniman-seniman, sasterawan-sasterawan, ahli-ahli, bahkan empu-empu, jang bisa kita bakan." (TAVIP).

Berdasarkan Amanat P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi itu, disulah suatu Konsepsi Pendidikan Nasional.

Konsepsi ini didasarkan pula atas Amanat P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, bahwa dasar dan isi-moral Pendidikan Nasional ialah Pantjasila-Manipol/Usdek, jang telah dituangkan kedalam Keputusan Presiden No.180 tahun Pendidikan Nasional ialah Pendidikan Bangsa (Nation dan Character building, jang membina suatu bangsa jang mampu atas tanggung-djawab sendiri menjelekkan Revolusinja, tahap demi tahap, dengan pengertian bahwa agama adalah unmutlak dalam rangka Nation dan Character building sesuai dengan Ketetapan MPRS tahun 1960.

Pendidikan Nasional Indonesia, ialah pendidikan jang baik materiil maupun spirituil membina manusia dan bangsa Sosialis Indonesia jang berdjawa Pantjasila-Manipol/Usdek sanggup menjelesaikan Ketiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol, jaitu:

"Kesatu; Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, jang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke."

"Kedua: Pembentukan satu masyarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu."

"Ketiga: Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar

kerdjasama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna."

Salah satu masalah jang sangat penting jang perlu pula diketengahkan disini ialah Pendidikan Nasional sebagai alat Revolusi. Revolusi Indonesia jang mempunyai rangka Tujuan seperti jang tertjantum didalam MAMIPOL R.I. dan bergerak pada ke-XI memerlukan pembinaan:

1. Manusia Indonesia Baru jang berdjawa Pantjasila-Manipol/Usdek dan sanggup berdjaja untuk mentjapai tjita2 tersebut.
2. Manpower jang tjukup untuk melaksanakan pembangunan.
3. Kepribadian kebudayaan Nasional jang luhur.
4. Ilmu dan teknologi jang tinggi.
5. Pergerakan massa aksinja seluruh kekuatan rakjat dalam pembangunan dan revolusi.

Untuk semuanya itu Pendidikan sebagai bagian jang integral dalam Revolusi harus merata dan sebagai landasan utama daripada pembangunan seperti jang tertera dalam Ketetapan MPRS NO.II Th.1960 harus difungsikan sebagai berikut:

1. Pendidikan sebagai pembina Manusia Indonesia Baru, jang berachlak tinggi.
2. Pendidikan sebagai produsen tenaga kerdja dalam semua bidang dan tingkatan.
3. Pendidikan sebagai lembaga pengembang kebudayaan Nasional.
4. Pendidikan sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik dan fisik mental.
5. Pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakjat.

Kelima Dharma Bhakti pendidikan dalam segala djenis dan tingkatnja jaitu:

1. Membina Manusia Indonesia Baru jang berachlak tinggi.
2. Memenuhi kebutuhan tenaga kerdja dalam segenap bidang dan tingkatnja.
3. Menadjukan dan mengembangkan kebudayaan Nasional.
4. Menadjukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menggerakkan dan menjadarkan seluruh kekuatan rakjat untuk membangun Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru.

Kelima tugas tersebut tak dipisahkan dari pengembangan olahraga sebagai alat untuk membangun manusia Indonesia Baru jang kuat fisik dan mentalnja.

Kelima tugas tersebut ditambah dengan pengembangan olahraga hendaknya didasari oleh dasar program setiap lembaga pendidikan serta dijadikan dasar pula bagi pembinaan tata kerdja dan pembagian kerdja diantara lembaga-lembaga pendidikan, mandiri, dalam mengisi Ketetapan MPRS No.II/MPRS/tahun 1960 Bab II pasal 2.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pula Tawif sebagai pedoman pelaksanaan yang mengandung Tri-Sakti:

1. Berdaulat dan bebas berpolitik
 2. "berdikari" dibidang ekonomi .
 3. Berkepribadian Nasional dalam bidang kebudayaan. (Asasat P.J.M. Presiden tentang Pendidikan Nasional 2 Mei 1965).
- Djuga dalam Asasat Politik "Berdikari" tertanggal 11 April 1965 ditetapkan sebagai berikut:
1. Pendidikan sebagai alat Revolusi dalam suasana Berdikari mengharuskan pembantingan stir dalam segala bidang, chususnja dalam bidang pendidikan

2. "Mempersiapkan Bangsa Indonesia setjara mental dan fisik untuk dengan iclas memikul tanggung-djawab dalam melaksanakan Ketiga Kerangka Tudjuan Revolusi Indonesia.
3. "Menindjau kembali dan menjesuaikan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dengan tuntutan perkembangan Revolusi kita sekarang ini. Dalam pelaksanaan tidak perlu diadakan perobahan dan meninggalkan kepribadian Bangsa Indonesia."

Dengan penegasan daripada tugas lembaga-pendidikan dalam Revolusi Indonesia maka djelaslah kedudukan pendidikan Indonesia dalam keseluruhan slagorde Revolusi Indonesia jang menghimpun seluruh kekuatan progressif revolusioner berporoskan Nasakom. Dengan demikian pula maka tugas pendidikan jang bersifat macro-pedagogis mendjadi djelas.

DASAR-AZAS PENDIDIKAN NASIONAL

Pantjasila-Manipol/Usdek adalah Moral dan Falsafah hidup Bangsa Indonesia serta merupakan manifestasi persatuan Bangsa dan Wilayah Indonesia, demikian pula merupakan perasan kesatuan djiwa sebagai Weltanschauung Bangsa Indonesia dalam penghidupan Nasional dan Internasional. Oleh karena itu Dasar/Azas Pendidikan Nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan Pendidikan Nasional adalah PANTJASILA-Manipol/Usdek.

Dengan demikian, Pantjasila-Manipol/Usdek harus mendjiwai semua segi Pendidikan Nasional.

TUDJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Tudjuan pendidikan Nasional kita baik jang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia jang susila, jang bertanggung-djawab atas terdelenggaranja Masjarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materil dan jang berdjiwa Pantjasila jaitu :

- a. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa
- b. Perikemanusiaan jang adil dan beradab
- c. Kebangsaan
- d. Kerakjatan
- e. Keadilan Sosial,

seperti didjelaskan dalam Manipol/Usdek.

ISI MORAL PENDIDIKAN NASIONAL

Isi Moral Pendidikan Nasional jang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta adalah Pantjasila-Manipol/Usdek.

POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL

Politik Pendidikan Nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia beserta pedoman2 pelaksanaannya. Oleh karena itu maka garis dan strategi dasar pelaksanaan Pendidikan Nasional-Demokratis harus melahirkan patriot2 komplit, yang berdasarkan Pantjasila-Manipol/Usdek, menentang segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, ialah :

- a. Imperialisme
- b. Kolonialisme dan Neo-kolonialisme
- c. Feodalisme
- d. Kapitalisme

dan yang berdjaoang dengan penuh kejakinan untuk membangun suatu Masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur serta membangun Dunia Baru.

PENGCHUSUSAN DALAM SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL

Pengchususuan Sistim Pendidikan Nasional diperkenankan sesuai dengan "aliran" politik dan kejakinan Agama yang dianutnja masing2 dalam rangka Pantjasila-Manipol/Usdek sebagai satu kesatuan.

PENJELANGARA PENDIDIKAN NASIONAL

Penjelenggara Pendidikan Nasional ialah Negara/Pemerintah, Lembaga2 Keagamaan, Lembaga2/Organisasi2 Kemasjarakatan, Orang Tua/Wali murid, menurut bidang, hak, kewadajiban dan wewenangnja masing2, dalam satu ikatan kerdjasama yang harmonis demi tertjapainja tudjuan Pendidikan Nasional.

P E N U T U P

Rumus-Induk Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila yang telah disusun seperti tersebut diatas, harus didjadikan titik-tolak darimana dijabarkan semua segi pelaksanaan baik yang bertalian dengan bentuk maupun isi Pendidikan Nasional, seperti struktur, kurikulum, didaktik, dan metodik Pendidikan Nasional, dengan memperhatikan adanya masa peralihan.-

REKA : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttc
SUHARNO